

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROPINSI BANGKA BELITUNG

EVI ANGGRAENI

Sistem Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang
Jl. Jend. Sudirman Selindung Lama Pangkalpinang Kepulauan Babel
email: evi_anggraeni_aja@yahoo.co.id

Abstract

The Bangka Belitung Family Planning Agency (BKKBN) is a government agency that the existing focusing problems and in order not to deviate from the subject, so in this thesis boundary problem will be discussed is accountability reporting process of treasurer.

Problems encountered is data processing activities are still done manually which raises a variety of problems like delay in making the report, data storage unfavorable result occurs waste of time in the grouping of data, less assurance of accuracy of data and possibility of recording errors in service.

Authors use the UML method in analyzing the object-oriented system like use case diagram, activity diagram and sequence diagram. Authors use the ERD and LRS in designing the system. Authors use the Microsoft Office Visio 2007 for display screen design and Authors use the Microsoft Office Access 2007.

The purpose of this thesis is The Bangka Belitung Family Planning Agency (BKKBN) can improve the existing system, expected data processing and presentation of information manually created design can be facilitated by a computerized system. Computerized system is expected to support achieving the target like ease in providing quality transactions, provide the required manajemen, time efficiency in treasurer's service delivery reporting, informative document output, improve the effectiveness of data processing in order to produce a complete and updated information and improve the quality of services to those in need.

Kata kunci: accountability reporting process of treasurer,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 73/PMK.05/Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif.

Namun dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di Lingkungan Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Bangka Belitung masih menggunakan sistem yang manual, dimana semua laporan yang harus dipertanggungjawabkan masih direkap dan dibuat kembali setiap periode yang sudah ditentukan. Hal ini membuat laporan yang dibutuhkan tidak dapat

tersaji tepat waktu karena harus membongkar kembali arsip-arsip yang berhubungan dengan laporan tersebut, sehingga kadang-kadang hasil yang diinginkan tidak efektif dan efisien. Belum lagi ada arsip yang hilang atau terselip.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak perusahaan-perusahaan maupun pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi computer dalam membantu kegiatan dan pekerjaan sehari-hari.

Oleh karena itu, penulis ingin merancang suatu sistem informasi yang sudah terkomputerisasi untuk mengatasi permasalahan mengenai pelaporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran di Lingkungan Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Bangka Belitung. Agar hasil yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik, cepat, dan akurat. Sehingga judul skripsi yang ingin diambil oleh penulis adalah “ Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Bangka Belitung “.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang sudah diuraikan diatas, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Terlambatnya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
- b. Data-data atau arsip yang berhubungan dengan laporan tersebut kadang-kadang tidak lengkap, hilang, dan rusak.
- c. Sulit menemukan data-data atau arsip yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Bangka Belitung, dimana hanya membahas masalah laporan yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran mengenai pengeluaran kas.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan didalam melakukan perancangan suatu sistem informasi.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data

- 1) Observasi, melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung sistem pengolahan data kepegawaian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2) Wawancara, mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan bagian terkait.
- 3) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber referensi baik berupa buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya sebagai acuan dalam analisa sistem kepegawaian serta penyusunan laporan.

b. Analisa Sistem

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kegiatan sistem berjalan, dapat dianalisis data dan proses-proses untuk menentukan batas sistem. Menspesifikasikan sistem yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, data base yang ada.

Adapun tahap-tahap pada analisa sistem antara lain :

- 1) *Activity Diagram*
Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau *workflow* sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas didalam suatu proses.
- 2) Analisa Dokumen Keluaran
Analisa keluaran adalah analisa mengenai dokumen – dokumen keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem.
- 3) Analisa Dokumen Masukan
Analisa masukan adalah bagian dari pengumpulan informasi tentang system yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan adalah memahami prosedur berjalan.
- 4) *Usecase Diagram*
Use case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau *actor*.
- 5) *Use Case Description*
Usecase Deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan secara inci mengenai *use case diagram*.

c. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang system secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program.

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai berikut :

- 1) *Entity Relationship Diagram (ERD)*
- 2) *Logical Record Structure (LRS)*
- 3) Relasi
- 4) Spesifikasi Basis Data
- 5) Rancangan Dokumen Keluaran

- 6) Rancangan Dokumen Masukan
- 7) Sequence Diagram

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Bangka Belitung adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pelaporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran agar menjadi lebih efektif, cepat, akurat, dan efisien.

Sistem ini juga diharapkan dapat menyediakan informasi yang akurat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Juga menciptakan manajemen pengarsipan dan penyimpanan berkas-berkas yang memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga meminimalisasi kesalahan yang timbul dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Bangka Belitung.

Dengan merancang dan menerapkan sistem yang terkomputerisasi ini dapat menjadi solusi terdapat masalah yang dihadapi pada Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Bangka Belitung, data-data yang berhubungan dengan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban bendahara dapat tersimpan rapi dan aman serta pencarian data dapat dengan mudah, cepat dan akurat.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian skripsi yang secara sistematis dalam bab per bab terdiri dari lima bab.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sistem informasi

Sistem informasi adalah kombinasi seperangkat komponen yang terdiri dari orang, *hardware*, *software*, jaringan telekomunikasi dan data yang

saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, analisis masalah dan visualisasi dalam organisasi.

Aktifitas dasar dari Sistem Informasi menurut Laudon dan Laudon (2010, P46-47) adalah sebagai berikut:

- a. *Input*
- b. *Process*
- c. *Output*
- d. *Feedback*

2.1.1 Sistem informasi

Menurut Jogiyanto faktor-faktor yang menentukan kehandalan dari suatu sistem informasi atau informasi dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Keunggulan (*usefulness*)
- b. Ekonomis
- b. Kehandalan (*Reliability*)
- c. Pelayanan (*Custamer Service*)
- d. Kapasitas (*Capacity*)
- e. Sederhana dalam kemudahan (*Simplicity*)
- f. Fleksibel (*Fleksibility*)

2.1.2 Definisi Sistem

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem dapat disimpulkan bahwa sistem dikelompokkan menjadi dua bagian yang menekankan pada prosedurnya dan rasa yang menekankan pada elemennya. Kedua kelompok ini adalah benar dan tidak bertentangan yang berbeda adalah cara pendekatannya, atau dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Karakteristik Sistem

Menurut Agus Mulyanto (2009:2), “Suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik, yaitu komponen atau elemen (*component*), batas sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environment*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), pengolah (*process*), keluaran (*output*), sasaran (*objective*), atau tujuan (*goal*)”.

Karakteristik sistem mempunyai beberapa komponen diantaranya yaitu :

- a. Komponen Sistem (*Components*)
- b. Batas Sistem (*boundary*)
- c. Lingkungan Luar Sistem (*Environments*)
- d. Penghubung (*Interface*)
- e. Masukan (*Input*)
- f. Keluaran (*Output*)
- g. Pengolahan (*Process*)
- h. Sasaran (*Objectives*) dan Tujuan (*Goal*)

Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya.

2.1.4 Definisi Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki nilai tambah, makna dan berguna bagi penggunanya.

2.2 Siklus Sistem Informasi

Siklus merupakan putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Siklus sistem informasi merupakan proses menghasilkan informasi harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan komputer sebagai teknologi informasi. Tahapan –tahapan tersebut terdiri atas Input proses output yang disebut sebagai siklus sistem informasi. Artinya, bila tahap telah sampai pada output tersebut dapat dijadikan input kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan dapat pula dijadikan data kembali sebagai input untuk diproses selanjutnya.

2.3 Subsistem Sistem Informasi

Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, subsistem ini bisa fisik maupun abstrak.

Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem, ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Masing – masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi. Sebagai contoh perusahaan perbankan besar semisal Bank Mandiri, sebagai suatu sistem, Bank Mandiri di suatu kota pastilah memiliki kantor cabang di tiap kecamatan dan kantor cabang memiliki subsistem, diantaranya bagian keuangan, bagian *frontliner*, dan lain sebagainya. Masing-masing bagian tersebut merupakan suatu sistem kecil atau subsistem dalam kantor cabang itu sendiri.

2.4 Sistem Informasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

a. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)

Laporan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun atas pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disebut LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Masih dalam pasal 1 disebutkan juga bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran pembantu, yang selanjutnya disebut LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas uang

yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Jika kita perhatikan proses pertanggungjawaban merupakan proses akhir dalam satu siklus pengelolaan sumber daya yang berupa uang dan surat berharga yang menjadi tanggung jawab bendahara.

b. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)

Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk beberapa tujuan :

- 1) Memberikan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya sehingga tercipta komunikasi dua arah yang seimbang tentang posisi awal, mutasi dan posisi akhir dalam penggunaan sumber daya yang dipertanggungjawabkan.
- 2) Memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola bendahara.
- 4) Memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan.

Memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara pembukuan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola oleh bendahara.

c. Manfaat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)

Manfaat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara umum antara lain:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Sebagai alat komunikasi.

Laporan pertanggungjawaban merupakan informasi atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan atau dipercayakan kepada suatu entitas atau individu, dengan adanya informasi tersebut maka akan terjalin komunikasi antara pemberi dan penerima sumber daya tersebut bahkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan atas sumber daya dan informasi tersebut.

- 2) Laporan Pertanggungjawaban sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem Pengendalian Manajemen sangat diperlukan data dan informasi agar dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di masa yang akan datang menjadi lebih tepat dan akurat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hasil intepretasi data dan informasi tersebut sehingga diharapkan organisasi akan berjalan seperti yang diharapkan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban sebagai sarana akuntabilitas.
- 1) Laporan pertanggungjawaban adalah sarana dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.4.1 Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML

Analisa dan perancangan berorientasi objek berarti merumuskan dan menyelesaikan masalah serta menghasilkan suatu hipotesa atau *diagnose* (solusi), memodelkannya dengan pendekatan atau paradigm obyek (obyek adalah suatu riil yang mempunyai atribut atau data dan perilaku).

2.4.2 Pengantar UML (*Unified Modeling Language*)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar dalam

industry untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan system piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah system.

Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, system operasi dan jaringan apapun,serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan *class* dan *operation* dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek.

Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya *Grady Booch* OOD (*Object Oriented Design*), Jim Rumbaugh OMT (*Object Modeling Technique*), dan Ivar Jacobson OOSE (*Object Oriented Software Engineering*). Tujuan utama UML diantaranya adalah untuk :

- a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.
- b. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa.
- c. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.

2.4.2.1 Analisa Berorientasi Objek

Menurut [Aji supriyanto 2005] “Analisa sistem berorientasi objek adalah tahap menentukan kebutuhan perangkat lunak, yang mendaftarkan apa pun yang harus dipenuhi oleh system *software*, bukan mengenai bagaimana system *software* melakukannya”. Hasil dari tahap analisa adalah dokumen *software requirement specification* (SRS).

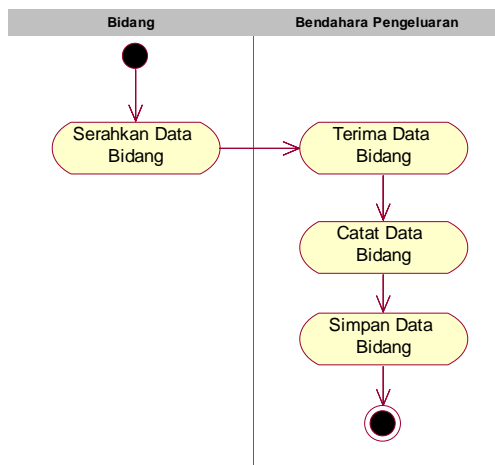
Keberhasilan dari tahapan analisa adalah memahami kebutuhan – kebutuhan system dan membuat konsep sistem baru yang menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem guna memenuhi kebutuhan – kebutuhan sistem . Tujuan utama dari analisa berorientasi objek adalah memodelkan system yang nyata dengan penekanan apa yang harus dilakukan sistem.

Pendekatan dalam analisa berorientasi objek dilengkapi dengan alat-alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembang hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang dapat terdefinisi dengan baik dan jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

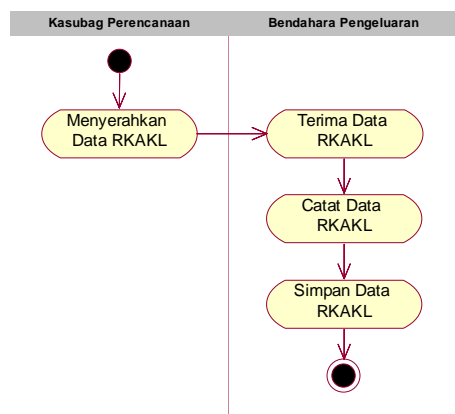
3.1 Activity Diagram

a. Pendataan Bidang



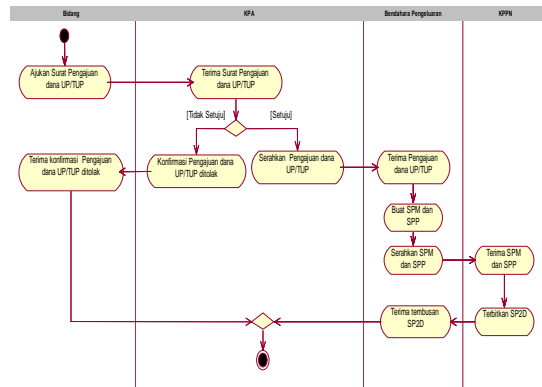
Gambar 4.2 Activity Diagram Pendataan Bidang

b. Pendataan RKAKL



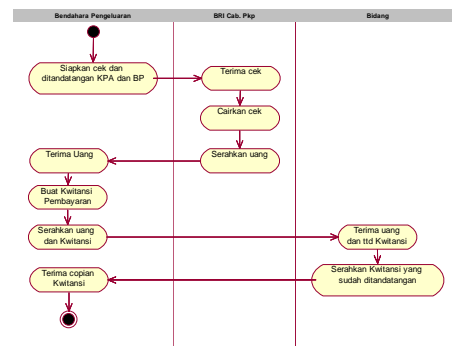
Gambar 4.3 Activity Diagram Pendataan RKAKL

c. Pengajuan Dana UP/TUP



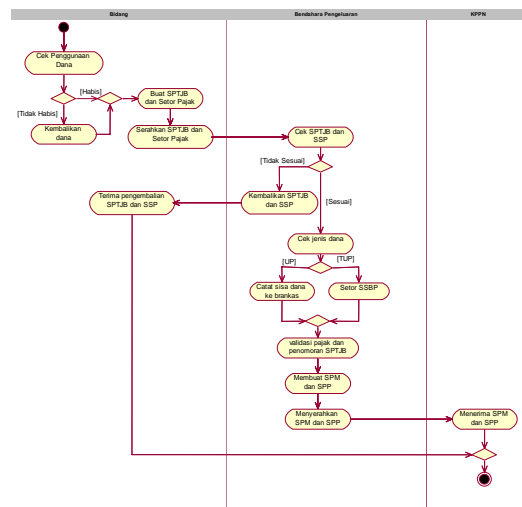
Gambar 4.4 Activity Diagram Pengajuan Dana UP/TUP

d. Pencairan Dana



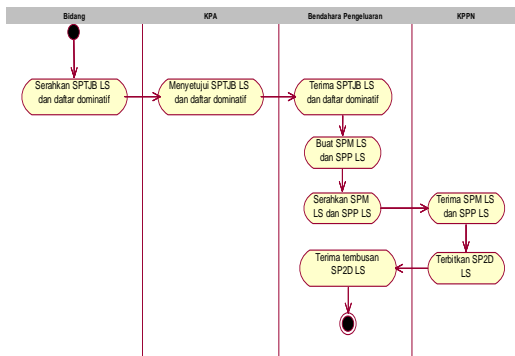
Gambar 4.5 Activity Diagram pencairan Dana

e. Pertanggungjawaban Dana



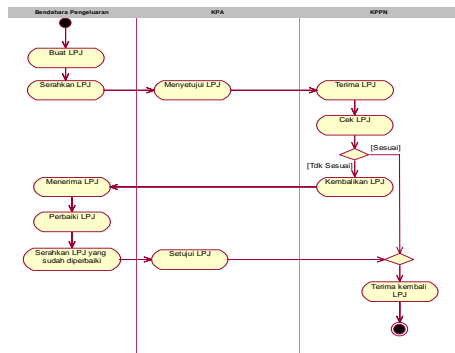
Gambar 4.6 Activity Diagram Pertanggungjawaban Dana

f. Pengajuan SPTJB LS



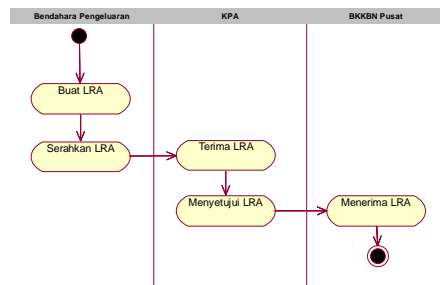
Gambar 4.7 Activity Diagram Pengajuan SPTJB LS

g. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran



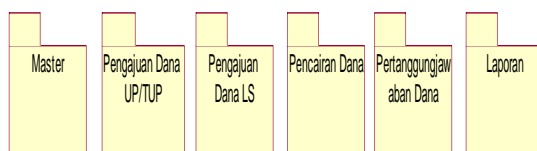
Gambar 4.8 Activity Diagram Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

h. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



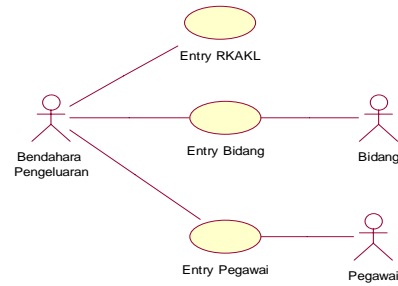
Gambar 4.9 Activity Diagram Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.2 Usecase Diagram Package Diagram



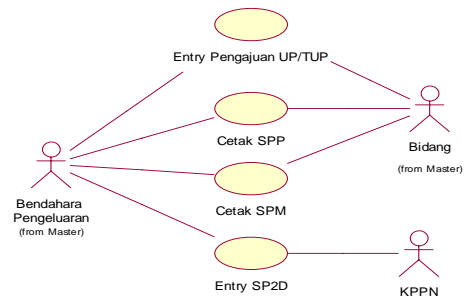
Gambar 4.10 Package Diagram Sistem Usulan

a. Use Case Diagram Package Master



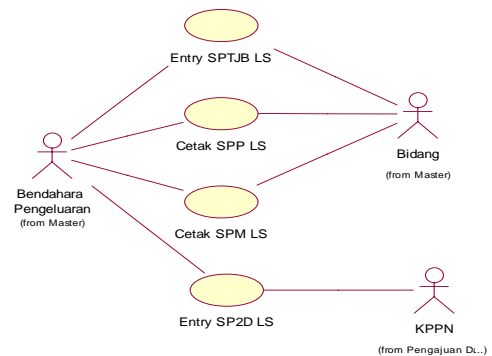
Gambar 4.11 Use Case Diagram Package Master

b. Use Case Diagram Package Pengajuan Dana UP/TUP



Gambar 4.12 Use Case Diagram Pengajuan Dana UP/TUP

c. Use Case Diagram Package Pengajuan Dana LS



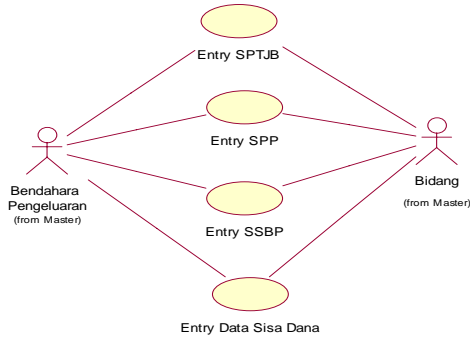
Gambar 4.13 Use Case Diagram Pengajuan Dana LS

d. Use Case Diagram Package Pencairan Dana



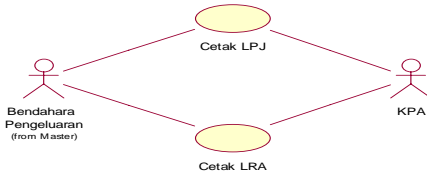
Gambar 4.14 Use Case Diagram Package Pencairan Dana

e. Use Case Diagram Package
Pertanggungjawaban Bendahara



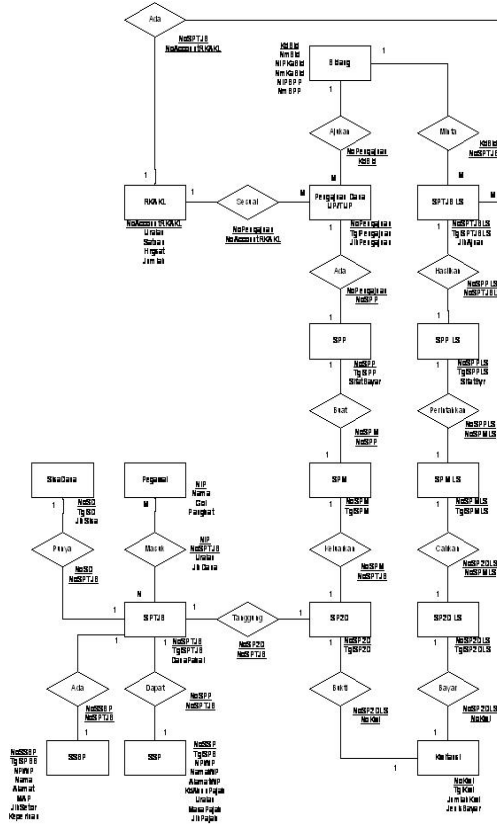
Gambar 4.15 Use Case Diagram Package
Pertanggungjawaban Bendahara

f. Use Case Diagram Package Laporan



Gambar 4.16 Use Case Diagram Package
Laporan

3.3 Entity Relationship Diagram



Gambar 4.17 Entity Relationship Diagram

3.4 Rancangan Layar

a. Entry Bidang

Gambar 4.21 Rancangan Layar Entry Bidang

b. Entry RKAKL

Gambar 4.22 Rancangan Layar Entry RKAKL

c. Entry Pegawai

d. Entry Pengajuan Dana UP/TUP

Gambar 4.24 Rancangan Layar Entry
Pengajuan Dana UP/TUP

e. Cetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

f. Cetak Surat Perintah Membayar (SPM)

Gambar 4.26 Rancangan Layar Cetak SPM

g. Entry SP2D

Gambar 4.27 Rancangan Layar Cetak SP2D

h. Entry SPTJB

NIP	Nama	Uraian	Jumlah Dana
Pilih	Display	Input	Input
Display	Display	Disolav	Disolav

Gambar 4.28 Rancangan Layar Entry SPTJB

i. Entry SSP

Entry SSP

Surat Setor Pajak

No. Surat Setor Pajak

Tanggal

Data SSP

NPWP Uraian

Nama Masa Pajak

Alamat Jumlah Pajak

Kode Akun Pajak

Data SPTJB

No. SPTJB Display Cari

Tanggal SPTJB Display

No. SP2D Display

Tanggal SP2D Display

No. SPM Display

Tanggal SPM Display

No. SPP Display

Tanggal SPP Display

Sifat Pembayaran Display

No Pengajuan Display

Tanggal Display

Kode Bidang Display

Nama Bidang Display

No. Account Display

Uraian Display

Satuan Display

Jumlah Pengajuan Display

Simpan Batal Keluar

Gambar 4.29 Rancangan Layar Cetak SSP

j. Cetak SSBP

Entry SSBP

Surat Setoran Bukan Pajak

No. SSBP

Tanggal

Data SSP

NPWP MAP

Nama Jumlah Setor

Alamat Keperluan

Data SPTJB

No. SPTJB Display Cari

Tanggal SPTJB Display

No. SP2D Display

Tanggal SP2D Display

No. SPM Display

Tanggal SPM Display

No. SPP Display

Tanggal SPP Display

Sifat Pembayaran Display

No Pengajuan Display

Tanggal Display

Kode Bidang Display

Nama Bidang Display

No. Account Display

Uraian Display

Satuan Display

Jumlah Pengajuan Display

Cetak Batal Keluar

Gambar 4.30 Rancangan Layar Cetak SSBP

k. Entry Sisa Dana

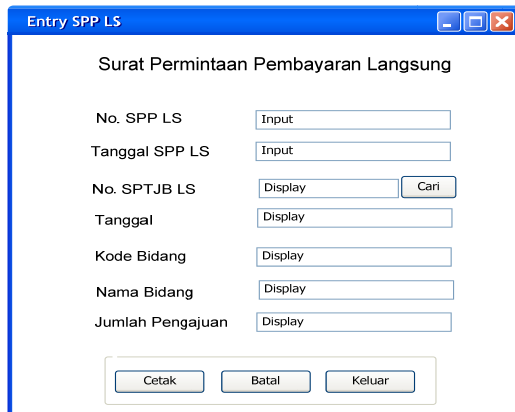
Gambar 4.31 Rancangan Layar Entry Sisa Dana

l. Cetak Kwitansi

m. Entry SPTJB LS

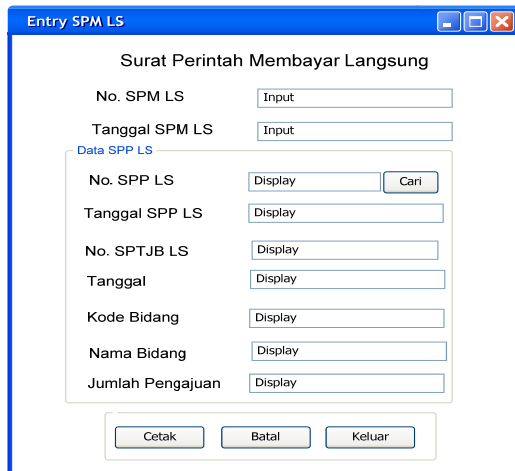
Gambar 4.33 Rancangan Layar Entry SPTJB LS

n. Cetak SPP LS



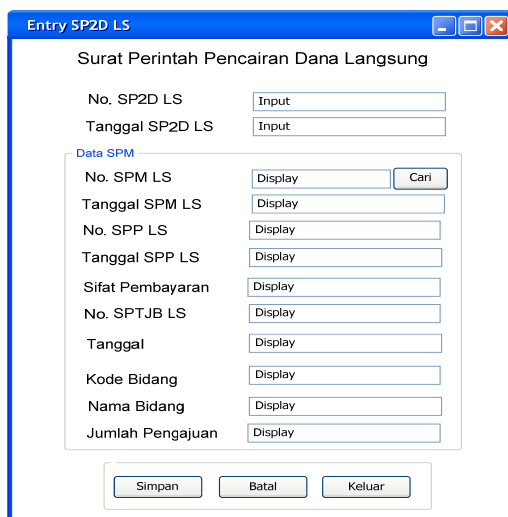
Gambar 4.34 Rancangan Layar Cetak SPP LS

o. Cetak SPM LS



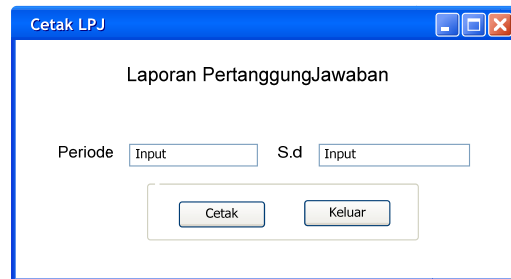
Gambar 4.35 Rancangan Layar Cetak SPM LS

p. Entry SP2D LS



Gambar 4.36 Rancangan Layar Entry SP2D LS

q. Cetak LPJ



Gambar 4.37 Rancangan Layar Cetak LPJ

r. Cetak LRA



Gambar 4.38 Rancangan Layar Cetak LRA

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang diterapkan pada Perwakilan BKKBN Propinsi Bangka Belitung masih bersifat manual. Sehingga kesalahan baik di sengaja ataupun tidak sering terjadi dikarenakan kontrol dari sistem yang berjalan kurang baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer maka diharapkan dapat meningkatkan proses administrasi pelaporan pertanggungjawaban, serta informasi laporan-laporan di Perwakilan BKKBN Prop. Bangka Belitung lebih cepat, efisien dan efektif memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan.
- Dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer diharapkan kinerja kerja para pegawai dapat lebih baik serta melaksanakan tugas lebih disiplin.
- Dengan sistem berbasis komputer akan mempermudah dalam pembuatan transaksi dan laporan

- d. Meringankan pekerjaan dalam mengontrol data dan membuat hasil laporan kepada pimpinan.
- e. Semua data - data bisa tersimpan secara keseluruhan, sehingga kecil sekali kemungkinan adanya kehilangan data.
- f. Proses pencarian data sebelumnya dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

5.2. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat meningkatkan keberhasilan Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, maka langkah yang diperlukan dalam membangun sistem komputerisasi ini sangatlah penting.

Maka berikut adalah beberapa saran agar sistem informasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien :

- a. Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menunjang Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan, merawat serta mengembangkan sistem.
- c. Diberi pelatihan dan pendidikan cara menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- d. Dibuat aturan serta prosedur yang jelas tentang pentingnya Sistem Informasi Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- e. Perlu adanya *back up* data guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- f.

DAFTAR PUSTAKA

- [Jogianto 2003] Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2003
- [Munawar 2005] Munawar, *Pemodelan Visual dengan UML*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005

[O'brien James A 2006
[PP 2010]

O'brien, James A., *Pengantar Sistem Informasi*, Jakarta, Salemba Empat, 2006.

[Sutopo,Hadi,Ariesto
2002]

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sutopo, Hadi, Ariesto, *Analisis dan Desain Berorientasi Objek*, Yogyakarta, J&J Learning, 2002.

[Whitten,Jeffrey...
2004]

Whitten, Jeffrey L., Lonnie D. Bently, Kevin C.Dittman. *System Analysis and Design Methods*. 6th ed. New York : Mc Graw-Hill, 2004.

[Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 / PMK.05 / 2012]

Tata Cara Pembayaran Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 3 / PB / 2014]

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.